

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui konsep Komunikasi Pemberdayaan yang dilakukan oleh kedua objek peneliti (Pokdarwis Ardhi Mandala Giri dan BUMDes Serang Makmur Sejahtera) melalui Program Pengembangan Pariwisata dari Dinas Pemuda, Pariwisata dan Olahraga. Program Pengembangan Pariwisata Dinporapar telah berhasil dilakukan oleh Dinas Pemuda, Pariwisata dan Olahraga di kedua Desa Wisata Panusupan serta Desa Wisata Serang, menitikberatkan pada unsur pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Tahun 2012-2027 serta RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

Partisipasi pembangunan program Pengembangan Pariwisata memberikan hasil yang signifikan untuk masyarakat desa wisata. Hal ini didukung dengan adanya komunikasi pemberdayaan dalam interaksi antara pemegang kepentingan (*stakeholder*). Berdasarkan hasil penelitian, seluruh elemen Komunikasi Pemberdayaan berupa komunikator (fasilitator), pesan (materi pendidikan), media atau saluran (*channel*), khalayak atau komunikan (penerima manfaat) serta *feedback* (umpan balik) berjalan dengan lancar. Konsep komunikasi pemberdayaan merupakan suatu hal yang baru dalam bidang pemberdayaan, untuk itu kebaruan ini menjadi hal yang akan menunjang penelitian selanjutnya.

Community Based Tourism sebagai konsep yang dilakukan Dinporapar dalam menjalankan Program Pembangunan Pariwisata berusaha untuk mewujudkan hubungan harmonis antara setiap pemegang kepentingan atau stakeholder yang ada di desa wisata berupa Organisasi Perangkat Daerah, Kelompok Masyarakat, Swasta dan Media Massa. Kerjasama antara pemegang kepentingan menjadikan masyarakat memiliki kapasitas merespon untuk meningkatkan permintaan pariwisata yang bertujuan untuk kesejahteraan hidup masyarakat.

Melalui analisis SWOT pula, ditemukan faktor pendukung serta penghambat Desa Wisata Panusupan dan Desa Wisata Serang dalam melaksanakan Program Pengembangan Pariwisata. Faktor yang mendukung antara lain pelaksanaan rapat rutin desa wisata, komunikasi yang baik antara desa wisata dengan *stakeholder*, adanya pemandu wisata profesional, terciptanya mutual understanding, promosi melalui

media sosial Dinporapar dan masing-masing Desa Wisata. Faktor pendukung tersebut dapat berhasil ketika Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus, RPJMD dan Riparda mengenai Program Pengembangan Pariwisata, hubungan harmonis antara stakeholder, bantuan dari fasilitator, serta pengawasan penuh dari Dinporapar berjalan semestinya. Namun, terdapat faktor penghambat yang dapat terjadi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Pariwisata oleh Dinporapar. Faktor penghambat yang ditemukan yaitu adanya perbedaan pemahaman Materi dan cepat oleh pokdarwis dan masyarakat lokal, kurangnya kampanye sapta pesona, akses teknologi komunikasi, adanya keterbatasan bahasa daerah, dan jumlah sumber daya manusia yang sedikit. Ancaman dapat yang terjadi ketika pemerintah kurang demokratis dalam memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, serta jumlah fasilitator yang sedikit. Faktor penghambat khusus di desa wisata Panusupan yaitu pergantian kepala desa dan potensi pada desa wisata lain yang lebih menarik. Sementara pada desa wisata Serang, BUMDes harusnya lebih berfokus pada kegiatan ekonomi saja.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti mengalami beberapa keterbatasan saat menyusun data serta temuan pada tulisan ini. Peneliti menyadari bahwa seluruh program yang dilaksanakan Dinporapar merupakan siklus tahunan dimana peneliti tidak dapat mengikuti rangkaian program pengembangan pariwisata yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2018. Oleh karena itu, peneliti berharap untuk selanjutnya dapat berpartisipasi pada seluruh program.

Dalam penelitian ini, keterbatasan peneliti karena untuk referensi terkait komunikasi pemberdayaan masih terbatas, karena komunikasi pemberdayaan merupakan konsep baru yang berkembang dari konsep pembangunan. Sehingga peneliti disini mengharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memiliki cakupan referensi yang banyak dan dapat membahas ruang lingkup terkait komunikasi pemberdayaan secara luas.

C. Saran Peneliti

1. Saran untuk Mahasiswa/i

Penelitian ini hanya berfokus pada komunikasi pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Dinporapar, Pokdarwis Ardhi Mandala Giri serta BUMDes Serang Makmur Sejahtera yang terlibat dalam program pengembangan pariwisata yang

dilaksanakan di desa wisata Panusupan dan desa wisata Serang. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam. Karena Komunikasi Pemberdayaan masih memiliki keterkaitan dengan Komunikasi Pembangunan sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dianalisis sesuai dengan teori serta metode lain yang lebih beragam.

2. Saran untuk Pokdarwis Ardhi Mandala Giri

Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Pariwisata, perlu adanya kesepemahaman seluruh masyarakat Desa Wisata Panusupan. Pokdarwis diharapkan dapat melaksanakan sosialisasi secara mandiri secara intens agar masyarakat setempat cepat memahami Materi dan Sapta Pesona. Setelah adanya pemahaman, diharapkan Pokdarwis dan masyarakat setempat lebih giat mengkampanyekan Sapta Pesona dalam Program Pengembangan Pariwisata. Perlu adanya peningkatan akses teknologi komunikasi seperti jaringan telepon dan akses internet dalam mendukung program Pelatihan IT, Pemasaran dan Promosi Desa Wisata. Keterbatasan interaksi antara Pokdarwis yang terjadi karena perbedaan bahasa daerah (dominan) dengan wisatawan yang berasal dari luar kota perlu dapat diatasi apabila Pokdarwis membuat program Literasi Bahasa secara mandiri.

Dengan adanya program pengembangan pariwisata, yang ada diharapkan Pokdarwis terus konsisten sebagai satu-satunya pelaku desa wisata. Pokdarwis perlu membuka ruang agar masyarakat setempat dapat berpartisipasi demokratis dalam memberikan keputusan Program Pengembangan Pariwisata. Pokdarwis secara terus menerus perlu menggali potensi Sumber Daya Manusia serta Sumber Daya Alam, karena keterbatasan fasilitator menyebabkan program pengembangan pariwisata sehingga hasil belum memberikan hasil yang signifikan. Selain itu, perlu adanya penerimaan anggota baru melihat Sumber Daya Manusia yang sedikit yang dapat mempengaruhi Pokdarwis hingga ketika berada di masa vakum. Kepala Desa yang baru perlu segera beradaptasi agar dapat mengambil langkah serius untuk mengawasi proses komunikasi pemberdayaan selama Program Pengembangan Pariwisata berlangsung.

3. Saran untuk BUMDes Serang Makmur Sejahtera

Program Pengembangan Pariwisata yang ada di Desa Wisata Serang telah berjalan dengan baik. Namun, beberapa hal perlu diperhatikan terutama BUMDes sebagai lembaga ekonomi masyarakat, seharusnya hanya Divisi Pariwisata yang perlu

berfokus dalam keseluruhan kegiatan pariwisata. BUMDes Desa Wisata Serang bersama masyarakat desa wisata Serang perlu meningkatkan aktivitas kampanye Sapta Sapta Pesona dalam Program Pengembangan Pariwisata. Keterbatasan Sumber Daya Manusia BUMDes justru menyebabkan tumpang tindih antara sebagian besar struktur anggota BUMDes dengan Pemerintah Desa. Perlu adanya seleksi ulang antara keduanya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang stabil.

Pemerintah khususnya Dinporapar perlu usaha ekstra dalam mengawasi adanya keberlangsungan Program Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Serang dibawah naungan PT. Pelaksanaan Program Pengembangan Pariwisata oleh Dinporapar dinilai masih kurang demokratis dalam memberikan kesempatan berpartisipasi BUMDes. Hal ini menjadikan BUMDes perlu menyediakan ruang tersendiri melalui rapat desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Terkait dengan jumlah fasilitator yang sedikit dan kurang mencukupi untuk program pengembangan pariwisata, BUMDes perlu mengadakan penarikan anggota sehingga tidak bergantung hanya pada tenaga fasilitator. Selain itu, BUMDes juga perlu meningkatkan akses teknologi komunikasi seperti jaringan telepon dan akses internet sehingga Pelatihan IT, Pemasaran dan Promosi Desa Wisata tidak maksimal.

4. Saran untuk Dinporapar

Dinporapar sebagai instansi yang memiliki wewenang langsung dalam kelancaran adanya Program Pengembangan Pariwisata, diharapkan terus membuka peluang dalam mengembangkan potensi desa terkait dengan Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus serta UU Desa No. 6 tahun 2014. Adanya dokumen RPJMD tahun 2015 – 2025 serta Riparda mengenai Program Pengembangan Pariwisata yang bersifat sustainable dapat mempermudah Dinporapar membuka relasi antara Desa Wisata dengan berbagai stakeholder Organisasi Perangkat Daerah, Swasta, Media Massa dan Kelompok Masyarakat. Promosi melalui media sosial Website Resmi Dinporapar yang dapat menargetkan wisatawan lebih luas. Dinporapar perlu mengawasi kinerja Pokdarwis, BUMDes serta masyarakat lokal sehingga program dapat berjalan sistematis. Program Pengembangan Pariwisata diharapkan dapat berjalan lebih demokratis karena memiliki pengaruh besar bagi masyarakat.